

Etika Komunikasi Politik dalam Perspektif Islam

Zikrullah¹
Mena Sari²

Corresponding Author: zikrullahaini01@gmail.com

Abstract: This article aims to discuss Islamic views on political communication ethics. Through literature review, this study argues that communication ethics based on the principles of the Qur'an are essentially speaking correctly and honestly (*sadidan*), contextually (*baligha*), simply (*maysura*), gently (*layyina*), kindly (*karima*), and appropriate (*ma'rufa*), through which one's communication is likely to be effective. In regard with the ethics of political communication, general speaking it have been regulated substantially through moral standards that have been explained in the Qur'an and the *Sunnah* of the Prophet Muhammad Saw. The ethics of political communication in Islam essentially reflects the broad moral and ethical principles of Islam, including the principles of honesty (*al-a'dl*), justice (*al-qist*), respect (*al-ihsan*), avoiding injustice (*al-zulm*), dialogue, tolerance (*al-tasamuh*), encouragement of goodness (*al-amr bil ma'ruf*), and constructive criticism.

Keywords: Political communication, ethics, Islamic teachings, moral standards.

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan Islam tentang etika komunikasi politik. Melalui kajian kepustakaan, studi ini berargumentasi bahwa etika komunikasi berdasarkan prinsip-prinsip al-Qur'an hakekatnya adalah berbicara secara benar dan jujur (*sadidan*), kontekstual (*baligha*), sederhana (*maysura*), lemah lembut (*layyina*), baik (*karima*), dan pantas (*ma'rufa*). Dengannya komunikasi yang dilakukan oleh seseorang akan menjadi efektif. Sedangkan etika komunikasi politik dalam Islam telah diatur secara substansial melalui standar-standar moral yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an maupun sunnah Nabi Muhammad Saw. Etika komunikasi politik dalam Islam hakekatnya mencerminkan prinsip-prinsip moral dan etika Islam yang luas, termasuk prinsip kejujuran (*al-a'dl*), keadilan (*al-qist*), hormat (*al-ihsan*), menjauhi kezaliman (*al-zulm*), dialog, toleransi (*al-tasamuh*), mendorong pada kebaikan (*al-amr bil ma'ruf*), dan kritik konstruktif.

¹ Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh Bireun

² Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh Bireun

Pendahuluan

Komunikasi politik memiliki peran penting dalam membangun sebuah sistem politik dalam suatu negara. Pada setiap proses politik, komunikasi politik menempati posisi yang strategis bahkan, dinyatakan sebagai “urat nadi” proses politik. Betapa tidak, aneka struktur politik seperti parlemen, kepresidenan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, kelompok kepentingan, dan warga negara biasa memperoleh informasi politik melalui komunikasi. Darinya, setiap struktur menjadi tahu apa yang telah dan akan dilakukan berdasarkan informasi tersebut (Budiyono, 2012: 123). Secara teoretis, komunikasi politik merupakan komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah (Subiakto Ida, 2012).

Munculnya partai politik yang cukup banyak di Indonesia pascareformasi, setidaknya menunjukkan kesadaran masyarakat atas mekanisme demokrasi sebagai cara terbaik untuk mewujudkan cita-cita bersama. Partai politik memiliki peran penting sebagai alat komunikasi politik dalam sistem demokrasi. Fungsi-fungsi utama partai politik sebagai alat komunikasi politik antara lain; *pertama*, partai politik sebagai representasi masyarakat yang berfungsi sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah. Mereka mewakili berbagai kelompok dan kepentingan dalam masyarakat, membawa suara dan aspirasi masyarakat ke dalam proses politik. *Kedua*, partai politik sebagai pendidikan politik bagi masyarakat. Mereka menyebarkan informasi tentang kebijakan-kebijakan politik, ideologi, dan visi-misi partai kepada publik. Ini membantu meningkatkan pemahaman politik masyarakat. *Ketiga*, partai politik adalah sarana utama melibatkan masyarakat dalam pemilihan umum. Mereka mengorganisir kampanye politik, menyebarkan platform partai, dan menciptakan saluran komunikasi antara kandidat dan pemilih.

Keempat, partai politik memainkan peran penting dalam merekrut, melatih, dan memilih calon-calon politik. Mereka menjadi wadah bagi individu yang ingin berpartisipasi dalam politik, dan partai membantu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. *Kelima*, partai politik sebagai alat koordinasi dan negosiasi, yakni

berfungsi sebagai alat untuk koordinasi dan negosiasi di dalam pemerintahan. Mereka membantu mengintegrasikan berbagai kepentingan dan pandangan di tingkat legislatif atau eksekutif, menciptakan kerjasama dan kesepakatan politik. *Keenam*, sebagai kritik dan pengawasan, yakni partai politik memiliki peran dalam menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Mereka bertindak sebagai oposisi dan berperan dalam memastikan akuntabilitas pemerintah. Ini merupakan bagian penting dari fungsi kontrol dalam sistem demokrasi. *Ketujuh*, partai politik berfungsi sebagai penciptaan opini publik untuk membentuk dan mempengaruhi opini publik melalui kampanye, media, dan interaksi dengan masyarakat. Mereka membantu membentuk persepsi masyarakat terhadap isu-isu politik dan kebijakan (Surbakti, 1992: 117).

Namun demikian, beberapa politisi di beberapa negara, termasuk di Indonesia, melakukan komunikasi politik yang mungkin dianggap tidak etis, seperti penggunaan hoaks atau informasi palsu. Penyebaran informasi palsu untuk mencapai tujuan politik dapat dianggap tidak etis karena dapat merugikan proses demokrasi dengan memanipulasi persepsi masyarakat. Demikian halnya dengan kampanye hitam (*black campaign*) dan pencemaran nama baik dengan melancarkan serangan pribadi terhadap lawan politik dengan tujuan merusak reputasi tanpa memberikan argumen atau fakta yang jelas. Selain itu, politik Identitas dan SARA (Suku, Agama, Ras, dan antar Golongan) juga dikategorisasikan sebagai politik non-etis karena tindakan memanfaatkan isu-isu sensitif berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan untuk memperoleh dukungan atau membangkitkan sentimen tertentu dan dapat mengancam kerukunan sosial. Pula tindakan *money politics* dan penyalahgunaan dana kampanye (Holilah, 2020). Nah, upaya untuk membangun budaya politik yang lebih transparan, jujur, dan menghargai prinsip-prinsip demokrasi sangat penting untuk memastikan proses politik yang sehat dan etis.

Dalam Islam, komunikasi politik juga menjadi bagian dari ajaran agama yang penting. Hal ini bisa didapati dari ajaran al-Qur'an sebagai sumber primer umat Islam yang mengatur bagaimana manusia berinteraksi yang baik antar sesama manusia secara baik serta

bagaimana komunikasi politik kekuasaan menjadi bagian dari amanah untuk mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya. Artikel ini membahas bagaimana etika komunikasi politik dalam perspektif al-Qur'an.

Konsep Dasar Komunikasi dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an memiliki beberapa kata kunci yang berhubungan dengan komunikasi. Al-Syaukani misalnya, menyebut kata *al-bayan* sebagai kemampuan berkomunikasi. Pula didapati beberapa konsep lainnya, seperti *kalam* (كلام), *wahy* (وحي), *risalah* (رسالة), dakwah (دعوة), dan *ilm* (علم).

Wahy (وحي) merupakan penyampaian ilahi yang disampaikan kepada para rasul-Nya. Wahyu ini bisa berupa firman, petunjuk, atau informasi. *Risalah* (رسالة) merupakan pesan yang diemban oleh para rasul. Al-Quran sendiri sering kali disebut sebagai risalah, yaitu sebuah pesan atau kitab yang disampaikan kepada umat manusia. Sedangkan *dakwah* (دعوة) merupakan aktivitas mengajak manusia ke jalan Allah. Para rasul sering kali diberi tugas untuk memberikan dakwah kepada umat manusia agar mereka menyembah Allah dan mengikuti petunjuk-Nya. Adapun kata *ilm* (علم) adalah pengetahuan atau pemberitahuan. Al-Quran sering kali mengandung ayat-ayat yang memberikan pengetahuan atau pemberitahuan kepada manusia. *Mubashirat* (مبشرات) dan *Muntirat* (منذرات) merupakan ayat-ayat yang memberikan berita gembira (*mubashirat*) atau peringatan (*muntirat*).

Konsep kunci lainnya dalam komunikasi dalam al-Qur'an adalah "*Qaulan*" yang merujuk pada perkataan atau ucapan. Dalam konteks komunikasi, konsep *Qaulan* memberikan petunjuk dan pedoman mengenai bagaimana berkomunikasi dengan baik, bijak, dan efektif. Misalnya, dalam Q.S. Al-A'raf: 199, disebutkan bahwa orang yang mendekati Allah adalah orang yang berbicara dengan lemah lembut dan tidak kasar. Pula Q.S. Al-Hujurat: 12, mengingatkan agar manusia tidak mencela atau mencibir satu sama lain. Ada enam jenis gaya bicara (*qaulan*) yang disebutkan dalam al-Qur'an, yaitu:

Qaulan Sadidan.

Kata *qaulan sadidan* disebut dua kali dalam al-Quran, yakni. *Pertama*, Allah Swt menyuruh manusia menggunakan *qaulan sadidan* dalam urusan anak yatim,

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS An-Nisa: 9)

Kedua, Allah memerintahkan *qaulan sadidan* sesudah kata takwa *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah qaulan sadidan. Nanti Allah akan memperbaiki amal-amal kamu, mengampuni dosa kamu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ia akan mendapat keuntungan yang besar.”* (QS al-Ahzab: 70)

Darisini *qaulan sadidan* dapat diartikan sebagai pembicaraan yang benar, jujur, lurus, tidak bohong, dan tidak berbelit-belit. Dengan kata lain, prinsip komunikasi *qaulan sadidan* ini mendasarkan komunikasi atau transformasi informasi pada kriteria kebenaran konten (substansi), seperti faktualitas informasi, tidak ada unsur rekayasa atau manipulasi informasi. Selain itu, prinsip komunikasi *qaulan sadidan* juga mendasarkan pada kriteria kebenaran redaksi (tekstual), yakni penggunaan kata-kata yang baik, benar, baku, dan sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Lebih dari itu, kriteria kebenaran juga harus disandarkan pada ajaran al-Qur’an, sunnah, dan ilmu pengetahuan, seperti yang dinyatakan dalam QS Luqman: 20.

Qaulan sadidan juga diartikan sebagai ucapan yang jujur dan tidak bohong. Nabi Muhammad Saw bersabda:

"Sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada al-Birr dan al-Birr akan mengantarkan ke surga. Dan sesungguhnya, seseorang benar-benar bersikap jujur hingga dia menjadi orang yang shiddiq. Kebohongan akan mengantarkan kepada semua kefajiran (al-Fujur). Dan kefajiran akan mengantarkan ke neraka. Sungguh, seseorang benar-benar berbohong hingga ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta." (HR. Al Bukhari)

Qaulan Balighan

Kata “baligh” dalam bahasa Arab artinya sampai, mengenai sasaran atau mencapai tujuan. Apabila dikaitkan dengan *qaul* (ucapan atau komunikasi), “baligh” berarti fasih, jelas maknanya, terang, dan tepat. Oleh karena itu, prinsip *qaulan balighan* dapat diterjemahkan sebagai prinsip komunikasi yang efektif. (Effendi, 2010).

Menurut Jalaluddin Rahmat (1996: 83), pengertian *qaulan baligha* dapat dibagi menjadi dua; *pertama*, *qaulan baligha* terjadi bila da’i (komunikator) menyesuaikan pembicaraannya dengan karakteristik khalayak yang dihadapinya atau sesuai dengan *frame of reference and field of experience*. *Kedua*, *qaulan baligha* terjadi bila komunikator menyentuh khalayaknya pada hati dan otak mereka sekaligus. Demikian ini dapat dipahami bahwa kata *qaulan baligha* artinya menggunakan kata-kata yang efektif, tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, langsung ke pokok masalah (*straight to the point*), dan tidak berbelit-belit atau bertele-tele. Agar komunikasi tepat sasaran, gaya bicara dan pesan yang disampaikan hendaklah disesuaikan dengan kadar intelektualitas komunikan dan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh mereka.

Sebagai orang yang bijak bila berkomunikasi harus melihat situasi dan kondisi yang tepat dan menyampaikan dengan kata-kata yang tepat. Bila bicara dengan anak-anak harus berkata sesuai dengan pikiran mereka, bila dengan remaja harus mengerti dunia mereka. Jangan sampai berkomunikasi tentang teknologi nuklir dihadapan jamaah yang berusia lanjut yang tentu sangat tidak tepat sasaran, malah membuat mereka semakin bingung. Gaya bicara dan pilihan kata dalam berkomunikasi dengan orang awam tentu harus dibedakan dengan saat berkomunikasi dengan kalangan cendekiawan. Berbicara di depan anak TK tentu harus tidak sama dengan saat berbicara di depan mahasiswa.

Hal demikian ini didapati dalam firman Allah QS An-Nisa: 63 sebagai berikut.

“Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan

berilah mereka pelajaran, dan Katakanlah kepada mereka Perkataan yang berbekas pada jiwa mereka.”

Rasulullah memiliki keahlian komunikasi yang luar biasa dalam menyampaikan pesan-pesan agama dengan kata-kata yang sederhana namun sangat efektif. Umumnya ungkapan, hadis, dan *khotbah* rasulullah pendek, tapi dengan kata-kata yang padat dan penuh makna, yang dikenal dengan istilah “*jawami al-kalam* (kata ringkas penuh makna)” (Rāshid, 2020). Hal ini ditunjukkan rasulullah dalam berbagai *khotbahnya*, seperti *Khutbah Hajat*, *Khutbah Jumuhah*, dan *Khutbah Wida'*.

Rasulullah Saw menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat, sehingga pesannya dapat mencapai seluruh umat dengan baik. Bahkan beliau tak segan untuk mengulang perkataannya agar dapat dipahami lawan bicaranya. Anas bin Malik r.a. berkata: “*Rasulullah sering mengulang perkataannya tiga kali agar dapat dipahami*”.

Selain itu Rasulullah berbicara perlahan, jelas, terang, mudah dihafal, seperti kata Aisyah r.a.:

“Rasulullah SAW tidaklah berbicara seperti yang biasa kamu lakukan (yaitu berbicara dengan cepat). Namun beliau berbicara dengan nada perlahan dan dengan perkataan yang jelas dan terang lagi mudah dihafal oleh orang yang mendengarnya” (H.R. Abu Daud)

Keefektifan *khotbah* rasulullah juga karena kemampuannya untuk menyentuh hati dan pikiran pendengarnya. *Khotbah-khotbah* tersebut memberikan petunjuk praktis untuk kehidupan sehari-hari, nilai-nilai moral, serta tuntunan untuk mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat. Irbadh bin Sariyah, salah seorang sahabatnya bercerita;

“Suatu hari Nabi menyampaikan nasihat kepada kami. Bergeratlah hati kami dan berlinang air mata kami. Seorang diantara kami berkata Ya Rasulullah, seakan-akan baru kami dengar khotbah perpisahan. Tambahlah kami wasiat”.

Qaulan Maysura.

Kata *qaulan masyura* tertulis dalam QS. Al-Israa':28,
"Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat
dari Tuhanmu yang kamu harapkan, Maka katakanlah kepada
mereka ucapan yang pantas."

Maysura pada ayat di atas sebenarnya berakar pada kata *yasara*, yang secara etimologi berarti mudah atau pantas. *Qaulan maysura* sebenarnya lebih tepat diartikan 'ucapan yang menyenangkan' 'lawan kata dari ucapan yang menyulitkan'. *Qaulan maysura* berisi hal-hal yang menggembirakan via perkataan yang mudah dan pantas (Rakhmat, 2001: 91).

Komunikasi dengan *qaulan maysura* yang artinya pesan yang disampaikan itu sederhana, mudah dimengerti dan dapat dipahami secara spontan tanpa harus berpikir dua kali. Komunikasi dengan pendekatan ini harus mempertimbangkan *mad'u* yang dihadapi. Misalnya, ketika seorang *da'i* berbicara pada *mad'u* yang terdiri dari orang yang tergolong didzalimi haknya oleh orang-orang yang lebih kuat dan masyarakat yang secara sosial berada di bawah garis kemiskinan. Lapisan masyarakat seperti ini biasanya sangat peka dengan nasihat yang panjang, karenanya *da'i* harus memberikan solusi dengan membantu mereka dalam Komunikasi *bil hal*. *Qaulan maysura* merupakan salah satu tuntunan untuk melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan melegakan perasaan (Bahri, 2004).

Qaulan Layyina

Perintah menggunakan perkataan yang lemah lembut ini terdapat dalam QS Thaha: 44, ketika Allah Swt memerintah Nabi Musa dan Harun agar berbicara kepada Fir'aun dengan lemah-lembut dan tidak kasar. Hal ini agar hati komunikan jiwanya merasa tersentuh dan tergerak untuk menerima pesan yang disampaikan komunikator.

"Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut" (QS Thaha: 44).

Rasullulah selalu bertutur kata dengan lemah lembut, hingga setiap kata yang diucapkannya sangat menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Dalam *Tafsir Ibnu Katsir* diterangkan bahwa yang dimaksud *layina* ialah kata-kata sindiran, bukan dengan kata-kata terus terang atau lugas, apalagi kasar.

Komunikasi yang tidak mendapat sambutan yang baik dari orang lain adalah komunikasi yang dibarengi dengan sikap dan perilaku yang menakutkan dan dengan nada bicara yang tinggi dan emosional. Cara berkomunikasi seperti itu, selain tidak etis dalam pandangan agama juga kurang menghargai orang lain dan tidak efektif dalam proses penyampaian pesan.

Qaulan Karima

Qaulan karimah merupakan perkataan yang mulia. Hal ini dinyatakan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan jangan engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik” (QS. Al-Isra': 23).

Qaulan karima dalam ayat tersebut merupakan perkataan yang mulia, enak didengar, lemah-lembut, dan menggunakan tata-krama. Dan dibarengi dengan rasa hormat. Dalam konteks komunikasi, terma *qaulan karima* dipergubakan, khususnya, kepada berbicara kepada kelompok *mad'u* yang sudah masuk kategori usia lanjut. Seorang *da'i* dalam perkomunikasi dengan lapisan *mad'u* yang sudah masuk kategori usia lanjut, harus bersikap seperti terhadap orang tua sendiri, yakni hormat dan tidak kasar kepada mereka. Jika mereka berbuat salah atau melakukan hal-hal yang sesat menurut ukuran agama, maka harus diberitahu dengan menggunakan *qaulan karima*.

Komunikasi yang baik tidak dinilai dari tinggi rendahnya jabatan atau pangkat seseorang, tetapi ia dinilai dari perkataan seseorang. Cukup banyak orang yang gagal berkomunikasi dengan baik kepada

orang lain disebabkan mempergunakan perkataan yang keliru dan berpotensi merendahkan orang lain. Permasalahan perkataan tidak bisa dianggap remeh dalam komunikasi. Penggunaan bahasa menentukan kualitas komunikasi dan berimplikasi terhadap pada kualitas hubungan sosial.

Qaulan Ma'rufa

Qaulan ma'rufa dapat diterjemahkan dengan ungkapan yang pantas. Kata *ma'rufa* berbentuk *isim maf'ul* yang berasal dari kata dasar *'arafa*. Salah satu pengertian *ma'rufa* secara etimologis adalah *al-khair* atau *al-ihsan*, yang berarti yang baik-baik. Jadi *qaulan ma'rufa* mengandung pengertian perkataan atau ungkapan yang baik dan pantas (Amir. 1999: 85).

Jalaluddin rahmat menjelaskan, kan bahwa *qaulan ma'rufan* adalah perkataan yang baik. Allah Swt menggunakan frase ini ketika berbicara tentang kewajiban orang-orang kaya atau kuat terhadap orang-orang miskin atau lemah. *Qaulan ma'rufan* berarti pembicaraan yang bermanfaat memberikan pengetahuan, mencerahkan pemikiran, menunjukkan pemecahan terhadap kesulitan kepada orang lemah, jika kita tidak dapat membantu secara material, kita harus dapat membantu psikologi (Rahmat.1999: 41)

Qaulan Ma'rufa juga bermakna pembicaraan yang bermanfaat dan menimbulkan kebaikan. Sebagai muslim yang beriman, perkataan harus terjaga dari perkataan yang sia-sia, apapun yang diucapkan harus selalu mengandung nasehat, menyejukkan hati bagi orang yang mendengarnya. Jangan sampai hanya mencari-cari kejelekan orang lain, yang hanya bisa mengkritik atau mencari kesalahan orang lain, memfitnah, dan menghasut. Kata *qaulan ma'rufa* disebutkan Allah Swt dalam QS An-Nissa: 5 dan 8, QS Al-Baqarah: 235 dan 263, serta QS Al-Ahzab: 32.

Etika Komunikasi Politik dalam Al-Qur'an

Etika merujuk pada studi tentang prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia. Ini mencakup pertimbangan tentang apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, adil atau tidak adil

dalam berbagai situasi. Etika mencakup norma-norma moral dan nilai-nilai yang membimbing tindakan individu dan kelompok. Secara umum, etika memberikan kerangka kerja untuk merenungkan tentang tindakan dan keputusan, serta membantu individu dan kelompok untuk membuat pilihan yang dianggap baik dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang diakui (Suyatno, 2012).

Laudon menyatakan etika adalah standar moral yang membantu memandu perilaku, tindakan, dan pilihan yang didasarkan pada gagasan tanggung jawab (sebagai agen moral yang bebas, individu, organisasi, dan masyarakat bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil) dan akuntabilitas (individu, organisasi, dan masyarakat harus bertanggung jawab kepada orang lain atas konsekuensi tindakan mereka (Laudon, 1996: 67-70).

Adapun etika komunikasi merujuk pada pertimbangan etis seperti norma-norma moral dan prinsip-prinsip yang membimbing perilaku komunikasi antara individu atau kelompok dalam segala hal yang berkaitan dengan penyampaian informasi, pertukaran pesan, dan interaksi komunikatif antar pihak (Osborne, 2016).

Etika komunikasi melibatkan aspek-aspek kejujuran, integritas, rasa hormat, empati, dan tanggung jawab dalam berkomunikasi. Kejujuran dalam berkomunikasi hakekatnya adalah menghindari penipuan, menyampaikan informasi yang benar, dan menghindari manipulasi data atau fakta. Etika komunikasi juga mendorong transparansi, yaitu memberikan informasi yang cukup dan jelas kepada pihak yang berkepentingan tanpa menyembunyikan fakta atau maksud tertentu. Sedangkan integritas dalam etika komunikasi melibatkan integritas pribadi dan profesional. Ini mencakup konsistensi antara kata dan tindakan, serta menjaga nilai-nilai moral dalam komunikasi. Rasa hormat dan empati mengharuskan individu untuk menghormati hak-hak, pandangan, dan perasaan orang lain, termasuk menghindari diskriminasi, merendahkan, atau melakukan tindakan yang dapat merugikan atau merendahkan martabat pihak lain. Adapun maksud dari tanggung Jawab sebagai etika berkomunikasi mengarah pada tanggung jawab atas kata-kata dan tindakan komunikator yang berdampak terhadap orang lain dan masyarakat (Osborne, 2016).

Dalam konteks profesional, etika komunikasi sering menjadi bagian integral dari kode etik dalam berbagai profesi, seperti jurnalis, advokat, dan profesi lainnya. Dalam konteks komunikasi politik, etika merujuk pada norma-norma moral dan prinsip-prinsip yang mengatur cara komunikasi dilakukan dalam dunia politik. Hal ini mencakup cara politisi, partai politik, dan institusi politik lainnya dalam berkomunikasi satu sama lain atau berkomunikasi dengan masyarakat.

Etika komunikasi politik adalah faktor penting dalam membangun demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik. Penerapan prinsip-prinsip etika dalam komunikasi politik dapat membantu menjaga integritas proses politik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik dan pemimpin mereka. Beberapa aspek kunci dari etika komunikasi politik melibatkan beberapa aspek diantaranya adalah menerapkan etika kejujuran atau objektivitas berdasarkan fakta, senantiasa berlaku adil atau tidak memihak dengan menyampaikan berita secara berimbang, serta menerapkan etika kepatutan, kehormatan, dan kewajaran seperti (Amir, 1999:66).

Pada aspek kehormatan dan kewajaran, politisi diharapkan untuk berkomunikasi secara jujur dan konsisten, menghindari manipulasi informasi atau pemalsuan fakta. Etika komunikasi politik menekankan pentingnya memelihara kehormatan dalam pernyataan dan presentasi. Sedangkan aspek keteladanan dan integritas dimaksudkan agar politisi menjadi teladan moral dan menjaga integritas pribadi dan profesional. Perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai etika dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin politik. Selain itu, etika komunikasi politik menggarisbawahi tanggung jawab sosial seorang politisi terhadap masyarakat. Ini mencakup memberikan informasi yang akurat, mendorong partisipasi warga negara, dan berkomunikasi secara terbuka tentang kebijakan dan keputusan politik. Para politisi juga harus menjaga etika komunikasi dengan dialog dan toleransi. Artinya, politisi diharapkan untuk membangun dialog yang konstruktif dan menghormati pendapat yang berbeda. Etika komunikasi politik mendorong toleransi terhadap keragaman pandangan dan menciptakan ruang untuk diskusi yang sehat. Pula

eEtika komunikasi politik menekankan pentingnya menghindari kampanye negatif yang tidak benar atau menyerang lawan secara pribadi tanpa dasar yang kuat.

Dalam konteks Islam, etika komunikasi politik didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari nilai-nilai *ilahiyyah*. Etika komunikasi politik Islam mencerminkan prinsip-prinsip moral dan etika Islam yang luas, termasuk prinsip keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan masyarakat (Ardiansyah, Chaniago, Aziz, 2021; Rasid, 2011). Berikut adalah beberapa prinsip etika komunikasi politik dalam Islam:

Pertama, kejujuran (*al-'adl*). Komunikasi politik dalam Islam harus didasarkan pada kejujuran dan kebenaran. Menyampaikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan sangat dianjurkan. Prinsip kejujuran memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi politik dalam Islam. Menyampaikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan adalah tuntutan moral dalam Islam. Al-Qur'an menyuruh umat untuk selalu berkata benar, jujur, dan tidak berbohong. Kejujuran melahirkan kekuatan, sementara kebohongan mendatangkan kelemahan. Biasa berkata benar mencerminkan keberanian. Bohong sering lahir karena rendah diri, pengecut, dan ketakutan. QS An-Nahl: 105, menandakan bahwa "yang membuat-buat kebohongan itu hanyalah orang-orang yang tak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah pendusta."

Beberapa konsep terkait dengan kejujuran dalam komunikasi politik melibatkan sifat *Siddiq* (Ketulusan). Menyampaikan informasi dengan tulus dan tanpa niat untuk menipu atau menyembunyikan fakta yang penting. *Amanah* (kepercayaan): Menjaga kepercayaan masyarakat dan pemimpin dengan memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipercaya dan tidak dimanipulasi. *Transparansi*, yakni mengutamakan transparansi dalam penyampaian informasi, terutama dalam keputusan politik dan kebijakan publik. (Amir, 1999).

Kedua, keadilan (*al-qist*). Keadilan adalah nilai sentral dalam Islam. Komunikasi politik seharusnya mempromosikan keadilan sosial, ekonomi, dan politik. *Ketiga*, hormat (*al-ihsan*). Komunikasi politik seharusnya dilakukan dengan penuh hormat terhadap lawan politik,

pemimpin, dan masyarakat. Bahasa yang sopan dan menghargai merupakan prinsip yang penting. Prinsip hormat (*al-ihsan*) sangat penting dalam konteks komunikasi politik dalam Islam. Hormat mencakup penghargaan terhadap martabat dan hak-hak setiap individu, termasuk lawan politik, pemimpin, dan masyarakat umumnya. Beberapa aspek terkait dengan prinsip hormat dalam komunikasi politik Islam melibatkan sopan santun, yakni menggunakan bahasa yang sopan dan santun saat berkomunikasi, termasuk dalam debat atau perbedaan pendapat politik. Selain itu juga penghargaan terhadap pemimpin, yakni Islam menunjukkan penghargaan terhadap pemimpin, bahkan jika ada perbedaan pendapat. Etika komunikasi politik Islam mengajarkan agar pengkritikan terhadap pemimpin dilakukan dengan cara yang bermartabat dan konstruktif. Pula menjauhi fitnah terhadap lawan politik atau pemimpin, sebab fitnah dan pemfitnahan dianggap sebagai tindakan yang merugikan dan tidak etis. Demikian halnya dengan sikap menghormati keanekaragaman pendapat, berpikir positif, kritik yang konstruktif, dan partisipasi secara positif.

Keempat, menjauhi kezaliman (*al-zulm*). Komunikasi politik dalam Islam seharusnya tidak mendukung atau terlibat dalam kezaliman atau tindakan tidak adil. Dalam Islam kata *'adl* juga dikategorikan sebagai lawan kata dari kata *zulm*. Siapa yang tidak berlaku adil, maka ia dinilai bersifat zalim. Di dalam Al-Qur'an kata *al-adl* dengan segala perubahan bentuknya diulang sebanyak 28 kali. Diantaranya terdapat pada surat Al-An'am ayat 152:

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penubillahjanji Allah swt. yang demikian itu diperintahkan Allah Swt kepadamu agar kamu ingat.”

Al-Maragi mengatakan bahwa, keadilan dapat memperbaiki kondisi umat dan perorangan. Keadilan merupakan salah satu sendi dalam pembangunan dan sebagai asas utama dalam urusan sosial.

Karena itu tidak boleh bagi seorang mukmin untuk membedakan seseorang, meskipun ia famili atau kerabat dekat (Al-Maraghi, 1974:71).

Kezaliman dan tindakan tidak adil dikecam dalam ajaran Islam, dan komunikasi politik harus dijalankan dengan penuh keadilan dan persamaan hak. Beberapa aspek terkait dengan prinsip ini melibatkan keadilan dalam keputusan, yakni komunikasi politik seharusnya tidak mendukung atau mempromosikan kebijakan atau keputusan yang bersifat zalim atau merugikan sebagian masyarakat. Pula tidak menfitnah atau menjelekkan tanpa bukti. perlakuan adil terhadap semua pihak dan mendorong persamaan hak. Selain itu juga, menjauhi tindak korupsi dan mendukung penegakan hak asasi manusia (HAM).

Kelima, pentingnya dialog. Islam mendorong praktik dialog dan musyawarah dalam pengambilan keputusan politik. Partisipasi aktif dari masyarakat dan konsultasi dianggap penting. *Keenam*. kehati-hatian (*hifz al-lisan*). Islam mengajarkan untuk berbicara dengan hati-hati dan menjaga lisannya. Menghindari fitnah, *ghibah* (menggunjing), dan perkataan yang merusak reputasi orang lain. Untuk Dalam konteks ini, Islam juga mengedepankan konsep *tabayun* untuk mengecek akurasi informasi. Keakuratan data merupakan salah satu pokok etika komunikasi. Keakuratan informasi dalam komunikasi bila dilihat dari sejauh mana informasi tersebut telah diteliti dengan cermat dan seksama, sehingga informasi yang disajikan telah mencapai ketepatan. Menyampaikan informasi secara tepat merupakan landasan pokok untuk tidak mengakibatkan masyarakat mengalami kesalahan. Kesalahan yang ditimbulkan oleh kesesatan informasi tentu bisa diperkirakan betapa besar bahaya dan kerugian yang diderita oleh masyarakat. Untuk mencapai ketepatan data dan fakta sebagai bahan informasi yang disampaikan kepada masyarakat diperlukan penelitian yang seksama. Ajaran Islam mengkomodasikan etika akurasi informasi tersebut melalui beberapa ayat dalam al-Qur'an surat Al-hujarat ayat 6 menyatakan:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa

mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Ketujuh, toleransi (*al-tasamuh*). Masyarakat Islam dihimbau untuk menghormati perbedaan pendapat dan keyakinan politik. Toleransi dan sikap terbuka diapresiasi. *Kedepalan*, pentingnya nasihat (*al-nasihat*). Memberikan nasihat dengan baik dan berbuat baik kepada pemimpin dan masyarakat merupakan prinsip yang dianjurkan. *Kesembilan*, kritik yang membangun: Islam mendorong kritik yang konstruktif untuk perbaikan dan pembaruan. Kritik seharusnya tidak bersifat merusak atau menyebabkan konflik yang tidak perlu. *Kesepuluh*, mendorong pada kebaikan (*al-amr bil ma'ruf*), yakni, komunikasi politik seharusnya membimbing masyarakat untuk berbuat baik dan mempromosikan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam.

Simpulan

Bertolak dari pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa etika komunikasi berdasarkan prinsip-prinsip al-Qur'an hakekatnya adalah berbicara secara benar dan jujur (*sadidan*), kontekstual (*baligha*), sederhana (*maysura*), lemah lembut (*layyina*), baik (*karima*), dan pantas (*ma'rufa*). Dengannya komunikasi yang dilakukan oleh seseorang akan menjadi efektif.

Sedangkan etika komunikasi politik dalam Islam telah diatur secara substansial melalui standar-standar moral yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an maupun sunnah Nabi Muhammad Saw. Etika komunikasi politik dalam Islam hakekatnya mencerminkan prinsip-prinsip moral dan etika Islam yang luas, termasuk prinsip kejujuran (*al-a'dl*), keadilan (*al-qist*), hormat (*al-ihsan*), menjauhi kezaliman (*al-zulm*), dialog, toleransi (*al-tasamuh*), mendorong pada kebaikan (*al-amr bil ma'ruf*), dan kritik konstruktif.

Referensi

- Abdurrahman (1999). *Dasar-Dasar Public Relation*, Bandung: Alumni, 1999, h. 57
- Al-Maraghi, A, M (1974). *Tafsir al-Maraghi Jilid III* (Beirut: Dar al-Fikr,:1974), h.71.
- Amir, M. (1999). *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 85.
- Bahri, S, D (2004). *Pola Komunikasi Keluarga Orang Tua dan Anak dalam Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 110.
- Budyono, Z. (2012). *Memimpin di Era Politik Gaduh* , (Jakarta : Dcsc Publishing.
- Departemen Agama RI (2001). *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2001), h. 885
- Departemen Agama R.I (2005).*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan KitabSuci Al-Qur'an, Kathoda, 2005), h. 200
- Machiavelli, N. (2012). *Discorsi Sopra La Prima Deca di Titus Livius*, Discourses on Frist Ten Books of Titus Livius
- Nimmo. D. (2001). *Urgensi Komunikasi dalam Sistem Perpolitikan*, Bandung : Alumni, 2001, h. vi
- Novel, A. (1999). *Peradaban Komunikasi Politik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h. 120.
- Patterson, K (2005). Joseph Grenny, Ron McMillan, dan Al Switzler, *Crucial Conversations, Strategi Menghadapi Percakapan Berisiko Tinggi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm 3.
- Purwosusanto, H. (2016). *Komunikasi Politik dalam Tafsir (Kajian Atas Tafhimi Al-Qur'an Karya Abul A'la Al-Maududi)* dalam *Jurnal Tajdid* Volume XV Nomor 2 2016, h. 67

- Rahmat (1999). Efektivitas Berkomunikasi dalam Islam, Cet. I; Bandung: Mizan, 1999, h. 71
- Rahmat, J. (1996). *Islam Aktual*, (Jakarta: Mizan,1996), h. 83.
- Rahmat, J. (2001). *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 91
- Rahmat, J. (1996). *Etika Komunikasi Perspektif Religi*, (Jakarta: Perpustakaan Nasiona 1996).h. 41.
- Shihab, Q (2005). *Tafsir Al- Misbah*, (lentera hati,Jakarta) Al-quran Surat An Nisa ayat 9
- Subiakto, H & Ida, H. (2012). *Komunikasi politik, media, dan demokrasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Syaukani (tt), Tafsir Fath al-Qadir. Jilid 5, Beirut: Dar alFikr, t.th, h. 251